



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)  
**UNIT KERJA** : PT INDONESIA COMNETS PLUS

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : R ARI RAHMAT INDRA CAHYADI
2. Jabatan : DIREKTUR UTAMA
3. NHK : 518248

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.900.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 21 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
4. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 529.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA VOXY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
2. MOBIL, SUZUKI KARIMUN Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOTOR, HONDA KARISMA Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
5. MOTOR, YAMAHA X-MAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
6. MOTOR, VOLTA BEBEK Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. ----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.300.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.729.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.729.000.000

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.